

IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN PANGAN MURAH (GPM) SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN GRESIK

Bagus subarkah¹, Bambang Kusbandrijo², Supri Hartono³

¹²³ Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember, 2025

Revised Desember, 2025

Accepted Desember, 2025

Available Desember, 2025

bagussubarkah14@gmail.com

bk.untag@gmail.com

suprihartono@untag-sby.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Gerakan Pangan Murah (GPM) merupakan program pemerintah untuk menstabilkan harga dan memperkuat ketahanan pangan melalui penyediaan komoditas pokok dengan harga terjangkau. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi GPM di Kabupaten Gresik sebagai upaya meningkatkan keterjangkauan dan ketersediaan pangan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa GPM cukup efektif memperluas akses pangan murah bagi masyarakat, terutama kelompok rentan. Program ini telah menjangkau banyak kecamatan, termasuk wilayah dengan kerentanan pangan tinggi. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan stok, distribusi lokasi yang belum merata, serta perilaku borong yang mengurangi pemerataan manfaat. Secara keseluruhan, GPM berperan positif dalam stabilisasi harga dan akses pangan, namun masih membutuhkan penguatan teknis dan koordinasi agar pelaksanaannya lebih optimal dan merata di seluruh Kabupaten Gresik.

.Kata Kunci: *Implementasi Program, Gerakan Pangan Murah, Ketahanan Pangan, Kebijakan Publik*

ABSTRACT

The Affordable Food Movement (GPM) is a government program designed to stabilize food prices and strengthen food security by providing essential commodities at affordable prices. This study aims to describe the implementation of GPM in Gresik Regency in improving food availability and affordability. Using a descriptive qualitative method through interviews, observations, and documentation, the findings show that GPM is fairly effective in expanding access to affordable food, especially for vulnerable groups. The program has reached various districts, including areas with high food insecurity. However, several obstacles remain, such as limited stock, uneven distribution of locations, and hoarding behavior that reduces equitable access. Overall, GPM contributes positively to price stabilization and food accessibility, but requires stronger technical regulations and cross-sector coordination to ensure more optimal and equitable implementation across Gresik Regency.

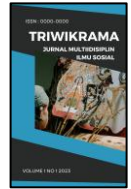
Keywords: *Policy Implementation, Affordable Food, GPM, Food Security*

1. PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan isu strategis nasional yang berperan penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, bergizi, merata, dan terjangkau. Namun dalam praktiknya, berbagai tantangan masih terus

*Corresponding author

E-mail addresses: bagussubarkah14@gmail.com



dihadapi, terutama terkait stabilitas harga pangan yang sering berfluktuasi dan aksesibilitas yang belum merata, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta wilayah terpencil. Fluktuasi harga menjelang hari besar dan gangguan distribusi dapat menurunkan daya beli masyarakat, sedangkan distribusi yang belum optimal serta minimnya infrastruktur menyebabkan ketimpangan akses pangan. Selain itu, alih fungsi lahan, ketergantungan pada impor, dan dampak perubahan iklim turut memperburuk kerentanan pangan nasional. Oleh karena itu, penguatan ketahanan pangan memerlukan upaya terpadu lintas sektor melalui peningkatan produksi lokal, perbaikan sistem distribusi, pengendalian harga, dan pemberdayaan masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dan berkelanjutan.

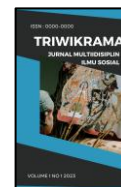
Data IKP tahun 2018-2024 menunjukkan bahwa Gresik secara konsisten berada pada Kategori “Sangat Tahan”, dengan nilai IKP yang terus bergerak naik, misalnya dari 84,70 pada tahun 2018 menjadi 90,90 pada tahun 2024.

Meski capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Gresik tergolong tinggi, tantangan multidimensional masih terus menghantui upaya menjaga stabilitas ketahanan pangan. Salah satu persoalan yang signifikan adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan perumahan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di wilayah Gresik sebagai salah satu kawasan industri strategis di Jawa Timur. Berdasarkan data BPS Kabupaten Gresik, luas lahan sawah mengalami tren penurunan dalam lima tahun terakhir, dari 33.214 hektar pada tahun 2019 menjadi sekitar 31.570 hektar pada tahun 2023. Hal ini dapat berdampak pada berkurangnya kapasitas produksi pangan lokal, terutama padi dan hortikultura.

Kondisi Kabupaten Gresik belum sepenuhnya menggambarkan bahwa seluruh wilayah berada pada situasi pangan yang aman dan stabil. Pada level kecamatan dan desa, masih ditemukan titik-titik prioritas kerawanan pangan yang ditandai dengan keterbatasan akses masyarakat terhadap komoditas pangan pokok, tingginya sensitivitas terhadap fluktuasi harga, serta ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah. Ketimpangan kondisi ketahanan pangan antarwilayah ini menunjukkan bahwa capaian IKP yang tinggi belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan akses dan keterjangkauan pangan di setiap lapisan masyarakat.

Di sisi lain, dinamika kenaikan harga pangan secara nasional dan regional memberikan tekanan tambahan terhadap kemampuan masyarakat, khususnya rumah tangga berpendapatan rendah, untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Situasi ini menuntut hadirnya sebuah kebijakan intervensi yang bersifat langsung, adaptif, dan mampu menjangkau masyarakat secara merata. Salah satu instrumen yang diupayakan oleh pemerintah adalah Program Gerakan Pangan Murah (GPM), yang bertujuan menyediakan komoditas pangan pokok dengan harga lebih terjangkau melalui mekanisme subsidi atau kerja sama dengan distributor dan pelaku usaha pangan. Program ini telah dijalankan secara intensif di Kabupaten Gresik sejak tahun 2023 melalui dinas pertanian dan ketahanan pangan, dan Badan Pangan Nasional.

Program GPM menjadi semakin relevan karena tidak hanya menawarkan solusi jangka pendek dalam menstabilkan harga pangan, tetapi juga berpotensi memperkuat ketahanan pangan daerah melalui peningkatan akses fisik dan ekonomi masyarakat terhadap pangan. Pelaksanaan kegiatan GPM di Gresik yang dilakukan secara berkala di berbagai kecamatan seharusnya dapat menjawab kesenjangan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pasokan pangan di wilayah-wilayah yang tergolong rawan. Pada kesempatan kali ini peneliti memfokuskan pembahasan pada Implementasi kebijakan van metern van horn sehingga peneliti mengangkat judul ***“Implementasi Program Gerakan Pangan Murah Sebagai Upaya Penguatan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Gresik”***.



TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano dalam Harbani Pasolong (2010:7), administrasi publik dipahami sebagai suatu proses di mana sumber daya publik, baik berupa tenaga maupun aparatur, diorganisasi dan dikoordinasikan untuk merumuskan, melaksanakan, serta mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Selanjutnya, Harbani Pasolong (2010:8) menjelaskan bahwa administrasi

publik merupakan kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.

Kebijakan Publik

Monahan dan Hengst, sebagaimana dikutip oleh Syafaruddin, menyatakan bahwa secara etimologis, kata “kebijakan” berasal dari bahasa Yunani polis, yang berarti “kota”. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan mencakup metode atau cara yang digunakan seluruh unsur pemerintahan untuk mengelola aktivitasnya. Dalam pengertiannya, kebijakan merupakan suatu sistem pengaturan organisasi yang telah disepakati untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan demikian, kebijakan dapat dipahami sebagai pedoman umum yang memberi arah tindakan dan batasan yang harus diikuti oleh pelaku kebijakan. Ini penting dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan rencana, dan pengelolaan organisasi. Kebijakan juga menjadi alat untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam proses pelaksanaan program.

Wehrich dan Koontz, seperti dikutip oleh Amin Priatna, mengartikan kebijakan sebagai instrumen untuk menjaga arah dan inisiatif dalam batasan tertentu. Kebijakan mencerminkan posisi dan kewenangan dalam organisasi, dan berfungsi sebagai panduan berpikir dalam pengambilan keputusan. Koontz dan koleganya menyatakan bahwa kebijakan membantu manajer dalam mengambil keputusan yang bersifat komitmen dan dapat mencakup ruang lingkup sempit maupun luas.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan bagian penting dari keseluruhan proses kebijakan publik. Baik menurut Anderson (1978) maupun Edward III (1980), sebagaimana dikutip oleh Tachjan (2006), implementasi dipahami sebagai rangkaian kegiatan administratif yang berlangsung setelah suatu kebijakan disahkan atau disetujui. Tahap ini sangat menentukan, karena kebijakan hanya akan memberikan dampak jika benar-benar diimplementasikan. Menurut pandangan Suharto (2008) dan Nugroho (2014), kebijakan yang tidak dijalankan hanya akan menjadi wacana semata. Dengan kata lain, sehebat apapun sebuah kebijakan dirancang, jika implementasinya tidak berjalan dengan baik, maka tujuan kebijakan tidak akan tercapai. Walaupun perumusan kebijakan bersifat konseptual dan implementasinya bersifat praktis, keduanya tetap tidak dapat dipisahkan karena hasil dari suatu kebijakan sangat tergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan.

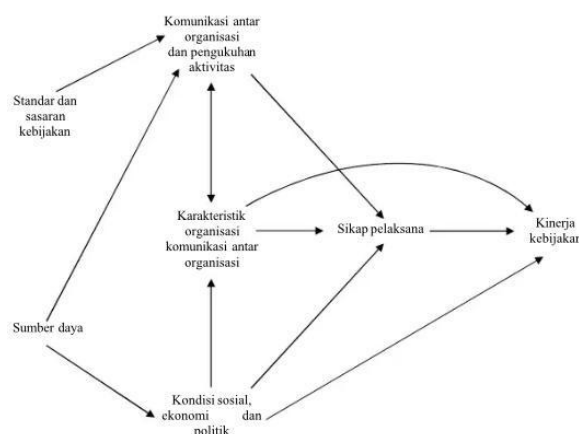
Menurut Van Meter dan Van Horn, dalam model yang mereka kembangkan berjudul *A Model of the Policy Implementation* (1975), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses yang merepresentasikan upaya nyata untuk menerapkan kebijakan guna mencapai tingkat kinerja yang optimal. Proses ini terjadi melalui interaksi sejumlah variabel yang saling memengaruhi. Model ini mengasumsikan bahwa pelaksanaan kebijakan berlangsung secara linear, dimulai dari pengambilan keputusan politik, kemudian dilanjutkan oleh pelaksana kebijakan, hingga menghasilkan kinerja kebijakan publik. Dalam penjelasannya, model ini menyatakan bahwa

keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh sejumlah variabel yang saling berkaitan satu sama lain, variable-variabel tersebut yaitu:

- Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan
- Sumber daya
- Karakteristik organisasi pelaksana
- Sikap para pelaksana
- Komunikasi antar organisasi terkait dari kegiatan-kegiatan pelaksana
- Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Secara skematis, model implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:

Gambar Model Van Meter dan Van Horn



Sumber : *Research gate*

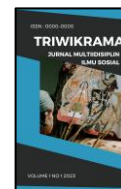
2. METODE

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang muncul dari permasalahan sosial dan kemanusiaan. Penelitian kualitatif mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata, kalimat, maupun gambar yang bermakna dan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam. Penekanannya terletak pada uraian yang rinci, lengkap, dan komprehensif untuk mendukung penyajian informasi (Nugrahani, 2014). Menurut Yin (dalam Nugrahani, 2014), dalam studi kasus peneliti dapat terus-menerus berinteraksi antara permasalahan teoritis yang sedang diselidiki dengan data yang dikumpulkan, serta dapat memanfaatkan bukti-bukti dari kejadian nyata untuk menghasilkan uraian yang mendalam mengenai kondisi di lapangan.

Jenis dan Sumber Data

Data penelitian ini dikumpulkan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gresik dan desa Pelem watu, yang berkaitan dengan implementasi Program Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya penguatan ketahanan pangan. Data tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi dan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial E-ISSN: 2988-1986



dianalisis lebih lanjut pada bab pembahasan. Dengan menggabungkan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan studi kasus, peneliti memperoleh wawasan mendalam mengenai implementasi Program Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai strategi penguatan ketahanan pangan. Metode ini memungkinkan peneliti memahami secara menyeluruh faktor-faktor keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi selama proses penelitian.

Pengumpulan Data

Secara umum, pengumpulan data kualitatif menggunakan beberapa teknik seperti, wawancara bertahap dan mendalam (*depth interview*), observasi partisipasi (*participant observation*, dan diskusi terfokus (*focus group discussion*). Adapun beberapa instrumen yang dapat dilakukan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi merupakan Secara umum, pengumpulan data kualitatif menggunakan beberapa teknik seperti, wawancara bertahap dan mendalam (*depth interview*), observasi partisipasi (*participant observation*, dan diskusi terfokus (*focus group discussion*). Kemudian peneliti melakukan wawancara yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian melalui proses tanya jawab secara tatap muka. Kemudian peneliti menggunakan dokumentasi agar data lebih relevan dengan focus penelitian. Data yang diperoleh melalui observasi atau wawancara akan memiliki kredibilitas yang lebih tinggi jika didukung oleh dokumen yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman (2014), yang berfokus pada pengolahan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pelaksanaan Program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kabupaten Gresik. Analisis ini bertujuan untuk menyaring, mengorganisir, dan menginterpretasikan data guna memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana GPM diimplementasikan sebagai strategi penguatan ketahanan pangan. Analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, 3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Standar Dan tujuan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara, instansi pelaksana memastikan bahwa Program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kabupaten Gresik telah dijalankan sesuai dengan tujuan serta pedoman Badan Pangan Nasional. Bu Eny dari Dinas Pertanian menjelaskan bahwa pelaksanaan GPM selalu mengacu pada aturan dari Badan Pangan Nasional. Ia menyampaikan bahwa tujuan program adalah menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan serta meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap bahan pokok. Menurutnya,

“Kami sampaikan tujuan itu kepada semua pelaksana di lapangan melalui koordinasi langsung. Jadi mereka benar-benar paham apa yang harus dicapai.”

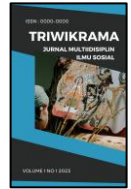
Hal tersebut diperkuat oleh Bu Iren dari Dinas Pertanian, yang menegaskan bahwa seluruh alur kerja sudah distandarkan. Ia menyampaikan bahwa,

“Alur kerjanya juga harus sesuai pedoman: mulai dari pengajuan kegiatan GPM ke Dinas, lalu kita buat surat balasnya, kemudian koordinasi lokasi, setelah itu pengajuan fasilitasi ke Bulog atau penyedia lain seperti Prima Freshmart. Setelah semua siap, baru pelaksanaan. Jadi langkah-langkahnya itu sudah distandarkan dan diawasi supaya tetap sesuai aturan.”

Dari sisi ketepatan sasaran, Mas Agung dari Bulog menilai bahwa GPM sudah mengenai target masyarakat secara langsung. Ia menyampaikan bahwa,

*Corresponding author

E-mail addresses: bagussubarkah14@gmail.com



“Yang datang dan beli itu memang masyarakat langsung, bukan pedagang. Jadi manfaatnya bisa dirasakan langsung sama warga. Kalau bisa, jadwalnya dibuat serutin mungkin agar masyarakat memahami tujuan dari program ini.”

Pandangan serupa disampaikan Mas Deny dari Prima Freshmart, yang menjelaskan bahwa mekanisme subsidi sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya,

“Harga dasar komoditas sebenarnya tinggi, tapi pemerintah membantu masyarakat dengan menurunkan harga sesuai kebutuhan mereka. Jadi menurut saya memang sudah tepat sasaran.”

Pada tingkat penerima manfaat, penilaian masyarakat menunjukkan bahwa tujuan program telah dipahami, tetapi belum sepenuhnya dirasakan secara optimal. Bu Nunik dari Desa Pelemwatu menyampaikan bahwa,

“Tujuannya sudah jelas buat bantu warga biar bisa beli kebutuhan pokok dengan harga lebih murah. Tapi di lapangan kadang manfaatnya nggak sepenuhnya kerasa karena beberapa barang harganya cuma beda sedikit sama harga pasar.”

Sementara itu, Bu Farida dari Perumahan Swan Mas menilai bahwa harga di GPM memang lebih murah, tetapi penyelenggaraannya yang jarang dan kurangnya pembatasan pembelian membuat manfaat program kurang merata. Ia menegaskan,

“Tadi itu ada yang beli sampai satu dus, jadi yang datang belakangan banyak yang nggak kebagian. Harusnya ada aturan maksimal pembelian biar semuanya merata.”

Berdasarkan keseluruhan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa standar dan tujuan kebijakan GPM sudah diterapkan melalui koordinasi, prosedur pelaksanaan, dan mekanisme distribusi yang sesuai pedoman. Namun efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui penetapan batasan pembelian, konsistensi jadwal, dan peningkatan sosialisasi agar tujuan program benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan Program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kabupaten Gresik masih menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, SDM, maupun logistik. Bu Eny dari Dinas Pertanian menjelaskan bahwa anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk subsidi harga komoditas. Ia menyampaikan,

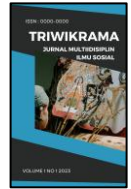
“Untuk sumber daya, jujur anggarannya masih terbatas, mas. Kami baru bisa menyediakan sarana untuk GPM, Seperti fasilitas dan konsumsi, tapi untuk subsidi harga komoditas itu belum ada anggarannya. Kalau SDM dari dinas itu minimal 5 orang yang ikut terjun ke lapangan untuk memonitoring, kalau dari Bulog 2-3 orang begitu pun dengan Prima Freshmart. Meskipun tergolong sedikit, tapi menurut kami itu cukup, petugas kami bisa menangani kegiatan pelayanan dengan baik.”

Keterbatasan logistik turut ditekankan oleh Bu Iren dari Dinas Pertanian, yang menyebutkan bahwa tidak adanya kendaraan operasional khusus menyebabkan proses distribusi barang tidak selalu berjalan optimal. Ia menuturkan,

“Kendalanya lebih ke logistik. Kami belum punya kendaraan operasional khusus GPM, jadi mobilisasi barang kadang agak terhambat. Selain itu, karena belum ada subsidi komoditas dari pemerintah daerah, barang yang dijual murah itu masih sangat bergantung pada Bulog dan vendor. Itu tantangan kami di lapangan.”

Dari sisi penyedia komoditas, Mas Agung dari Bulog menjelaskan bahwa stok tersedia namun harus diprioritaskan untuk program lain. Ia mengatakan,

“Stok itu sebenarnya ada, tetapi kita dahulukan dulu program bantuan pangan. Jadi tidak bisa mengeluarkan banyak ke GPM. Terutama minyak goreng, karena itu barang yang selalu cepat habis dan dibutuhkan untuk dua program sekaligus.”



Hal serupa disampaikan oleh Mas Deny dari Prima Freshmart, yang memaparkan bahwa ketersediaan produk bergantung pada jenis komoditas. Ia menjelaskan,

“Telur biasanya kita bawa sekitar 100 kilogram. Ayam juga ada targetnya sendiri. Untuk beras ya nanti bisa ditanyakan ke Bulog karena itu mereka yang pegang. Kami dari Prima Freshmart biasanya menanggung selisih harga karena di lapangan harus dijual lebih murah. Yang paling laku ya telur. Kalau kita bawa 100 kilo, paling tinggal 20 kilo. Total penjualan hari ini saja sekitar 80 kilo.”

Dari sisi masyarakat, keterbatasan stok menjadi persoalan yang cukup dirasakan. Bu Nunik dari Desa Pelemwatu menuturkan bahwa beberapa komoditas cepat habis dan pelaksanaannya sering berada di waktu yang kurang tepat. Ia menyampaikan,

“Untuk barangnya itu kadang kurang mas, terutama beras cepat habis karena memang sedikit. Terus masalah waktu seharusnya ditanggal muda, Karna tanggal tua jadi banyak warga yang nggak bisa beli karena uangnya sudah tipis. Itu yang bikin kurang maksimal.”

Senada dengan itu, Bu Farida dari Perumahan Swan Mas menilai bahwa meski barang cukup lengkap, jumlahnya belum memadai dibandingkan jumlah pengunjung. Ia menjelaskan,

“Barangnya cukup lengkap, mas, tapi cepat habis karena pengunjungnya banyak. Petugasnya sudah kerja bagus, tapi kelihatan kewalahan karena stok barang nggak sebanding sama jumlah warga yang datang. Jadi rasanya sumber dayanya masih perlu ditambah supaya semua bisa kebagian.”

Berdasarkan keseluruhan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang tersedia sudah mendukung pelaksanaan GPM, namun belum optimal. Anggaran belum mampu mendukung subsidi harga secara mandiri, logistik masih terbatas, dan ketersediaan stok komoditas tidak selalu sebanding dengan permintaan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan manfaat program belum dapat dirasakan secara merata oleh semua warga yang hadir.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

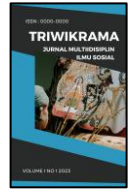
Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait, pola koordinasi dan karakteristik organisasi pelaksana dalam Program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa struktur peran antarinstansi telah tersusun dengan cukup jelas, meskipun masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek teknis pelaksanaan di lapangan.

Instansi pelaksana pada tingkat kabupaten menjelaskan bahwa mekanisme koordinasi telah diatur melalui pembagian tugas internal maupun lintas pihak. Bu Iren dari Dinas Pertanian mengungkapkan bahwa,

“Pembagian peran sudah jelas. Di internal kami ada tim yang menangani persiapan dan ada yang khusus menangani pelaksanaan. Untuk koordinasi lintas pihak, kami bekerja sama dengan pemerintah desa, kecamatan, kelurahan, kepolisian, dan vendor penyedia komoditas. Bulog dan distributor itu perannya menyediakan barang dengan harga di bawah pasar. Jadi mereka yang menyiapkan stok beras, telur, ayam, dan komoditas lainnya. Kami yang mengatur teknis pelaksanaan, penjadwalan, dan memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana.”

Dari sisi penyedia komoditas, koordinasi dinilai berjalan cukup baik karena peran masing-masing instansi sudah dipahami. Mas Agung dari Bulog menyampaikan bahwa pihaknya mengikuti arahan teknis dari instansi pemerintah daerah. Ia mengatakan,

“Koordinasi acara, lokasi, jadwal, itu semua dari Dinas Pertanian dan perangkat desa. Bulog cuma menyediakan komoditasnya dan menitipkan barang jika dibutuhkan. Jadi untuk teknis lapangan, kami mengikuti permintaan instansi terkait.”



Di pihak lain, Mas Deny dari Prima Freshmart menilai bahwa koordinasi sudah berlangsung baik, meski masih terdapat kekurangan dalam penataan teknis di lokasi acara. Ia menjelaskan,

“Biasanya untuk beras langsung dari Bulog. Kami fokus ke telur dan ayam. Tapi soal penataan stand, menurut saya perlu diatur lagi. Misalnya stand kami di mana, stand Bulog di mana. Kalau dari luar kan enak dilihat kalau tertata. Kalau sekarang masih kurang rapi.”

Kontribusi perangkat desa juga menjadi elemen penting dalam keberhasilan kegiatan GPM, terutama dalam hal penyebaran informasi, pengaturan lokasi, serta pendampingan pelaksanaan. Bu Nunik dari Desa Pelemwatu menyebutkan bahwa keterlibatan perangkat desa selama ini lebih bersifat sukarela dan belum menunjukkan struktur pembagian tugas yang resmi. Ia menyampaikan,

“Yang ngurus biasanya perangkat desa mereka yang sering info dan bantu di lokasi. Ya sejauh ini sudah jalan, cuma kelihatannya belum ada pembagian tugas yang resmi gitu, lebih ke inisiatif masing-masing aja.”

Berbeda dengan itu, Bu Farida dari Perumahan Swan Mas menilai bahwa perangkat desa dan instansi pelaksana bekerja cukup baik dalam menata lokasi dan alur pelayanan. Ia menuturkan,

“Menurut saya instansinya sudah cukup siap. Penataan lokasinya rapi dan alurnya jelas. Pelayanannya juga tertata, jadi warga bisa mengikuti alur pembelian dengan mudah.”

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana GPM sudah berada pada arah yang tepat. Koordinasi antarinstansi berlangsung baik dengan pembagian peran yang cukup jelas, mulai dari penyediaan komoditas oleh Bulog dan distributor, penjadwalan serta teknis pelaksanaan oleh Dinas Pertanian, hingga dukungan perangkat desa dalam pelaksanaan di lokasi. Namun demikian, terdapat beberapa aspek teknis yang masih perlu diperbaiki, seperti penataan stand, alur pelayanan, dan konsistensi pembagian tugas di tingkat desa agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih tertib, efisien, dan berdampak lebih optimal bagi masyarakat.

Komunikasi Antar Organisasi dan Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi antarinstansi dalam pelaksanaan Program Gerakan Pangan Murah (GPM) menunjukkan pola kerja yang cukup terstruktur, terutama pada tingkat pusat-provinsi-kabupaten. Namun, efektivitas komunikasi pada level teknis—khususnya mengenai penjadwalan dan penyampaian informasi kepada masyarakat—masih memerlukan perbaikan.

Secara kelembagaan, komunikasi dari tingkat pusat dan provinsi berjalan baik dan difasilitasi melalui mekanisme formal. Hal ini dijelaskan oleh Bu Eny dari Dinas Pertanian, yang menyatakan bahwa:

“Komunikasi alhamdulillah berjalan lancar. Dari pusat dan provinsi biasanya memberikan arahan lewat surat, rapat koordinasi, atau zoom meeting. Ada pembinaan juga yang menunjang pelaksanaan di daerah. Untuk petugas lapangan, kami sampaikan informasi melalui koordinasi langsung atau surat. Selama ini tidak ada kendala komunikasi antar pihak pelaksana. Semua berkoordinasi dengan baik.”

Meski demikian, efektivitas komunikasi di tingkat lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu permasalahan utama ialah ketidakteraturan jadwal GPM yang menyebabkan kebingungan bagi masyarakat dan para vendor. Mas Agung dari Bulog menyampaikan,

“Keluhan masyarakat banyak, mas. Mereka bilang, kadang GPM ada di sini, kadang di sana. Tidak jelas jadwalnya. Makanya banyak warga yang minta supaya GPM dibuat lebih rutin dan lebih terjadwal.”

Hal serupa diungkapkan oleh Mas Deny dari Prima Freshmart, yang menekankan perlunya ketepatan waktu dalam penyampaian informasi teknis kepada pelaksana maupun masyarakat. Ia menuturkan:



“Menurut saya yang perlu ditingkatkan itu pengaturan waktunya, mas. Tadi kita belum buka, tapi masyarakat sudah banyak yang datang. Pas pelaksanaan, apalagi saat kepala dinas datang, produknya sudah tinggal habis. Jadi koordinasi waktu dan alur penjualan ini perlu diperbaiki. Kadang kita juga tidak dapat informasi jelas soal jam buka, jadi pelaksana dan warga kadang tidak sinkron.”

Terkait penyampaian informasi kepada masyarakat, sebagian warga menilai bahwa informasi memang disebar dengan cepat melalui media informal, seperti grup WhatsApp kader desa atau PKK. Namun, jadwal yang diberikan dari tingkat atas sering kali tidak sesuai dengan kondisi warga di lapangan. Bu Nunik dari Desa Pelemwatu menjelaskan,

“Kalau soal info, cepat kok mas. Ada grup PKK, grup kader, jadi langsung nyebar. Cuma masalahnya itu, kadang jadwal dari atas kurang cocok sama kondisi warga di sini. Jadi walaupun infonya cepat, waktunya belum tentu pas buat masyarakat.”

Sementara itu, Bu Farida dari Perumahan Swan Mas mengungkapkan bahwa penyebaran informasi belum sepenuhnya merata dan masih bergantung pada penyampaian informal antarwarga. Ia menyampaikan,

“Informasinya sebenarnya ada, mas, tapi nggak semua warga tahu. Karena GPM di Gresik jarang, khususnya di daerah Pelemwatu itu juga baru pertama kali, infonya nggak menyebar luas seperti di Surabaya. Banyak warga yang tahunya mendadak dari tetangga atau grup WhatsApp.”

Secara keseluruhan, komunikasi antarinstansi pelaksana dari tingkat pusat hingga kabupaten dapat dikatakan sudah berjalan baik melalui rapat koordinasi, surat edaran, dan kanal komunikasi resmi lainnya. Namun, tantangan muncul pada tataran teknis dan operasional, terutama dalam hal kejelasan jadwal, ketepatan informasi bagi vendor, serta pemerataan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, meskipun komunikasi di tingkat struktural telah efektif, pelaksana di lapangan masih memerlukan perbaikan pada aspek penjadwalan, sinkronisasi waktu, dan penyebaran informasi agar kegiatan GPM dapat berjalan lebih tertib, teratur, dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Disposisi (Sikap) Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kabupaten Gresik, dapat dilihat bahwa komitmen, kedisiplinan, serta sikap para pelaksana memberikan pengaruh besar terhadap kelancaran kegiatan.

Dari pihak instansi pemerintah, Ibu Iren dari Dinas Pertanian menyampaikan bahwa:

“Komitmen pelaksana lapangan sangat baik, mas. Mereka disiplin dan cekatan saat menjalankan kegiatan. Interaksi dengan masyarakat juga bagus. Mereka komunikatif dan memberi penjelasan tentang program GPM. Sampai sekarang tidak ada masalah terkait sikap atau integritas petugas. Semua berjalan lancar.”

Kemudian dari pihak Bulog, Mas Agung menjelaskan bahwa:

“Kalau dari petugas ya siap, mas. Kita selalu siap melayani dan menyediakan barang. Tapi dating, datin jadwalnya tidak pasti, kita juga menyesuaikan. Kadang masyarakat sudah datang banyak, tapi barang cepat habis.”

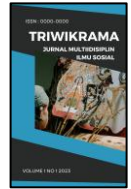
Sementara itu, dari pihak vendor, Mas Deny dari Prima Freshmart menyampaikan bahwa:

“Saya jujur ini pertama kali ikut program GPM di Gresik. Jadi masih belajar juga soal alur dan teknisnya. Tapi secara prinsip saya mendukung karena program ini memang membantu masyarakat. Tinggal teknis di lapangan saja yang perlu dipertajam lagi.”

Dari perspektif masyarakat, penilaian terhadap sikap dan pelayanan petugas juga sangat positif. Ibu Nunik dari Desa Pelem Watu mengungkapkan:

*Corresponding author

E-mail addresses: bagussubarkah14@gmail.com



“Perangkat desa sama petugasnya ramah-ramah, mas. Mereka nerima masukan, kayak soal tanggal muda atau harga yang beda tipis.”

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Farida dari Perumahan Swan Mas yang mengatakan:

“Petugasnya ramah dan cepat tanggap, mas. Mereka melayani dengan baik dan tetap sopan meskipun ramai. Secara pelayanan, menurut saya sudah bagus.”

Secara keseluruhan, sikap dan komitmen pelaksana GPM—baik dari unsur instansi pemerintah, perangkat desa, Bulog, maupun vendor dinilai sangat baik oleh masyarakat. Para petugas bekerja dengan disiplin, ramah, dan responsif meskipun kegiatan sering berlangsung ramai. Selain itu, pelaksana juga bersikap terbuka terhadap masukan masyarakat, misalnya terkait waktu pelaksanaan atau perbedaan harga komoditas.

Meskipun demikian, beberapa vendor mengaku masih beradaptasi dengan teknis pelaksanaan GPM di Gresik, terutama bagi pihak yang baru pertama kali terlibat. Secara umum, disposisi pelaksana menjadi faktor pendukung penting yang membantu kelancaran kegiatan dan meningkatkan kepuasan warga terhadap Program Gerakan Pangan Murah.

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak instansi, masyarakat, Bulog, dan vendor, kondisi sosial serta ekonomi masyarakat Gresik memiliki pengaruh langsung terhadap penerimaan dan pelaksanaan Program Gerakan Pangan Murah (GPM). Dari sisi instansi, Ibu Iren dari Dinas Pertanian menjelaskan bahwa:

“Kondisi masyarakat Gresik, terutama di perkotaan, sangat beragam dan mereka cukup sensitif terhadap kenaikan harga pangan. Makanya saat ada GPM, antusiasnya tinggi sekali. Bahkan kadang sebelum acara dibuka, masyarakat sudah ramai datang.”

Dukungan pemerintah daerah juga menjadi aspek penting dalam memperkuat pelaksanaan program. Ibu Eny, dari Dinas Pertanian menyampaikan bahwa:

“Dukungan pemerintah daerah juga memperkuat pelaksanaan GPM karena mereka mendukung penuh kegiatan ini karena sejalan dengan kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 63 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, sehingga setiap kegiatan GPM memiliki dasar hukum yang jelas dan menjadi bagian dari upaya resmi daerah dalam menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Respon masyarakat positif. Banyak yang berharap kegiatan ini sering diadakan dan barangnya diperbanyak, apalagi saat harga sedang naik.”

Dari sisi harga pangan, Mas Agung dari Bulog memberikan gambaran bahwa selisih harga yang signifikan membuat masyarakat sangat antusias:

“Jelas lebih murah, makanya masyarakat banyak yang datang. Tapi karena banyak yang datang itu, barangnya cepat habis. Apalagi minyak.”

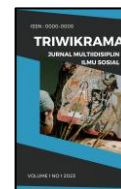
Mas Deny dari Prima Freshmart juga melihat tingginya permintaan masyarakat:

“Masyarakat antusias sekali, mas. Tadi sebelum buka saja sudah ramai. Begitu dibuka langsung banyak yang beli, terutama telur. Jadi memang kebutuhan masyarakat tinggi, apalagi harga-harga sekarang naik. Wajar kalau mereka buru-buru datang karena barang cepat habis.”

Dari sisi masyarakat, kondisi sosial ekonomi sehari-hari menentukan tingkat kehadiran dalam GPM. Ibu Nunik dari Desa Pelem Watu mengungkapkan:

“Pengaruhnya besar banget, mas. Soalnya kalau tanggal tua, warga banyak yang nggak datang karena uangnya sudah menipis. Makanya kemarin sepi. Ada juga yang beli banyak buat stok atau mungkin dijual lagi. Jadi kondisi ekonomi warga itu benar-bener ngaruh.”

Hal serupa disampaikan Ibu Farida dari Perumahan Swan Mas:



“Masyarakat sekarang banyak yang butuh harga murah, jadi pas ada GPM langsung ramai. Wajar sih karena kebutuhan pokok mahal. Makanya GPM ini penting buat bantu warga, apalagi kalau bisa lebih sering diadakan.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Gresik secara langsung memengaruhi tingkat partisipasi dan penerimaan terhadap GPM. Kenaikan harga kebutuhan pokok menyebabkan masyarakat sangat antusias menghadiri kegiatan, sehingga GPM menjadi program yang dianggap penting dan relevan. Namun pada kondisi ekonomi tertentu, seperti saat tanggal tua, sebagian warga tidak dapat membeli meskipun membutuhkan, sehingga partisipasi menurun. Antusiasme yang tinggi juga menyebabkan stok komoditas cepat habis dan tidak merata di setiap lokasi.

Di sisi lain, dukungan politik dan kelembagaan melalui Peraturan Bupati Gresik Nomor 63 Tahun 2023 memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan GPM, sekaligus memperkuat posisi program sebagai bagian dari strategi daerah dalam menjaga keterjangkauan pangan. Kondisi sosial masyarakat yang beragam turut memengaruhi pola respons, kebutuhan, serta dinamika keramaian di lapangan. Secara keseluruhan, faktor sosial, ekonomi, dan politik menjadi elemen lingkungan yang mendorong tingginya partisipasi masyarakat, namun sekaligus menimbulkan tantangan dalam ketersediaan stok, pemerataan distribusi, dan efektivitas kegiatan di tiap lokasi.

PEMBAHASAN

Standar dan Tujuan Kebijakan

Dalam teori Van Meter dan Van Horn, standar dan tujuan kebijakan menjadi fondasi utama implementasi. Standar yang jelas menentukan arah program, sedangkan tujuan menggambarkan capaian yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Dalam konteks Program Gerakan Pangan Murah (GPM), standar dan tujuan ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional sebagai upaya stabilisasi harga pangan dan peningkatan akses pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

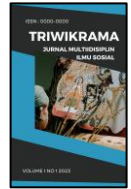
Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Gresik, ditemukan bahwa instansi pelaksana seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah memahami dan melaksanakan tujuan GPM, yaitu menyediakan komoditas strategis dengan harga lebih terjangkau. Bulog sebagai penyedia beras juga menegaskan bahwa program ini bertujuan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tingkat lokal. Namun, persepsi masyarakat mengenai GPM masih cenderung sebatas “pasar murah musiman”, belum sepenuhnya memahami bahwa program ini adalah bagian dari kebijakan stabilisasi harga pangan secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa standar kebijakan telah dirumuskan dengan baik pada tingkat instansi, namun belum tersampaikan secara merata pada tingkat masyarakat. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Suryana (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan program stabilisasi harga sangat bergantung pada pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap tujuan program.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa standar dan tujuan kebijakan GPM di Kabupaten Gresik telah dilaksanakan oleh pelaksana dengan cukup baik, tetapi masih diperlukan penguatan sosialisasi agar masyarakat memahami tujuan program secara lebih utuh, tidak hanya manfaat jangka pendeknya.

Sumber Daya (Resources)

Teori Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya, baik SDM, anggaran, sarana, maupun logistik. Sumber daya yang tidak memadai akan menghambat pencapaian tujuan kebijakan meskipun standar dan prosedurnya sudah jelas.

Hasil penelitian di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa pelaksanaan GPM didukung oleh anggaran pemerintah daerah dan pasokan komoditas dari Bulog serta mitra. Namun, beberapa



permasalahan sumber daya masih muncul di lapangan. SDM yang bertugas melayani masyarakat relatif terbatas, sehingga menimbulkan antrean panjang. Warga menyampaikan bahwa petugas sudah ramah dan cepat, tetapi jumlah personel tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang datang. Dari sisi logistik, stok beras dari Bulog relatif aman, tetapi komoditas lain seperti minyak goreng dan gula seringkali habis lebih cepat karena tingginya permintaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmawati (2021) yang menunjukkan bahwa program pasar murah sering mengalami ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan jumlah barang yang disediakan, sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat. Fasilitas pendukung seperti tenda, meja, mobil logistik, dan perangkat pendataan sudah disiapkan, tetapi pelaksanaan di ruang terbuka membuat kegiatan rentan terhadap kondisi cuaca. Meskipun demikian, pelaksana tetap berusaha menyesuaikan kondisi di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber daya GPM tergolong memadai tetapi belum ideal, terutama dari aspek SDM lapangan dan kuota komoditas. Penguatan sumber daya perlu dilakukan agar kualitas layanan meningkat dan program berjalan lebih optimal.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dalam teori Van Meter dan Van Horn, karakteristik organisasi pelaksana mencakup struktur, kapasitas, kewenangan, dan pola kerja organisasi yang menjalankan kebijakan. Semakin baik karakteristik organisasi pelaksana, semakin tinggi peluang keberhasilan implementasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi pelaksana GPM di Gresik terdiri dari Dinas Pertanian, Bulog, dan mitra pangan. Struktur kerja instansi tersebut relatif jelas, dengan pembagian tugas antara penyedia stok, pendistribusi, dan pelaksana teknis di lapangan. Namun, karakteristik organisasi di tingkat desa menunjukkan variasi. Desa yang memiliki perangkat aktif mampu menjalankan GPM dengan lebih tertib, sementara desa yang perangkatnya pasif cenderung mengalami keterlambatan informasi dan ketidakteraturan antrean.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Yulianingsih (2020) yang menemukan bahwa perbedaan kapasitas organisasi pemerintah desa memengaruhi keberhasilan implementasi program sosial. Desa dengan perangkat yang responsif dapat menjalankan program lebih baik dibanding desa yang kapasitas organisasinya rendah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana di tingkat instansi sudah kuat, tetapi terdapat ketimpangan kapasitas pada tingkat desa yang berpengaruh pada kualitas pelaksanaan GPM di wilayah tertentu.

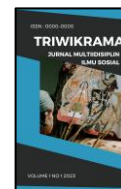
Komunikasi Antarorganisasi

Komunikasi yang efektif adalah unsur penting dalam model Van Meter dan Van Horn. Komunikasi mempengaruhi keseragaman pemahaman antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat. Tanpa komunikasi yang jelas, implementasi mudah mengalami distorsi kebijakan.

Dalam Program GPM, komunikasi antarinstansi—khususnya antara Dinas Pertanian, Bulog, dan mitra—berjalan cukup baik. Penjadwalan, jumlah komoditas, dan mekanisme distribusi dibahas melalui koordinasi rutin. Namun, masalah muncul pada komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Banyak warga menyatakan bahwa informasi GPM sering datang mendadak, bahkan beberapa hanya mengetahui dari tetangga. Hal ini menunjukkan bahwa saluran komunikasi publik masih kurang optimal.

Penelitian Utami (2021) menunjukkan bahwa salah satu penyebab pasar murah tidak menjangkau seluruh masyarakat adalah lemahnya komunikasi dari pemerintah desa ke warga. Temuan ini sejalan dengan kondisi GPM di Gresik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antarorganisasi pelaksana berjalan baik, tetapi komunikasi ke masyarakat masih perlu penguatan terutama dalam hal sosialisasi jadwal dan mekanisme pembelian agar lebih merata.



Sikap/Disposisi Pelaksana

Dalam model Van Meter dan Van Horn, sikap pelaksana sangat menentukan kualitas implementasi, terutama terkait komitmen, penerimaan, dan responsivitas terhadap kebijakan.

Berdasarkan penelitian, petugas GPM—baik dari instansi, Bulog, maupun desa—memiliki sikap yang positif dan ramah dalam melayani warga. Masyarakat menilai petugas bekerja cepat, membantu, dan terbuka terhadap keluhan, seperti permintaan pembatasan pembelian agar tidak ada pemborongan. Petugas juga menunjukkan komitmen tinggi, bahkan bersedia memperpanjang waktu pelayanan saat antrian masih panjang.

Namun, beberapa aturan, seperti pembatasan jumlah pembelian, belum diterapkan secara konsisten di semua lokasi. Sikap pelaksana sebenarnya sudah baik, tetapi keterbatasan regulasi dan sumber daya membuat implementasinya tidak selalu sempurna.

Penelitian Arifin (2020) menyatakan bahwa sikap pelaksana sangat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap program, terutama dalam program bantuan sosial. Hal ini juga terjadi pada GPM, di mana sikap ramah pelaksana meningkatkan kepuasan pengguna layanan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana GPM sangat mendukung implementasi, meskipun perlu penguatan pada penerapan aturan yang lebih konsisten.

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik memengaruhi tingkat keberhasilan kebijakan. Program yang sensitif terhadap kondisi masyarakat akan lebih mudah diterima dan dijalankan.

Dalam konteks GPM, kondisi ekonomi masyarakat Gresik yang sebagian berpendapatan rendah membuat program ini sangat dibutuhkan. Harga pangan yang cenderung naik menjelang hari besar menyebabkan masyarakat sangat antusias mengikuti GPM. Secara sosial, budaya gotong royong dan solidaritas warga membantu kelancaran kegiatan, seperti membantu mengatur antrian dan membantu petugas tanpa diminta.

Secara politik, program ini tidak menimbulkan konflik dan diterima baik oleh semua pihak. Dan di dukung Peraturan Bupati Gresik Nomor 63 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi, sehingga setiap kegiatan GPM memiliki dasar hukum yang jelas dan menjadi bagian dari upaya resmi daerah dalam menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pemerintah desa juga mendukung karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penelitian Sidiq (2022) menyatakan bahwa program pangan murah sangat efektif pada wilayah dengan kondisi ekonomi rendah dan budaya sosial yang kuat. Hal ini sepenuhnya relevan dengan kondisi Gresik.

Dengan demikian, faktor sosial, ekonomi, dan politik di Kabupaten Gresik mendukung pelaksanaan GPM, menjadikannya salah satu program yang tepat sasaran.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Program Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai Upaya Penguatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Gresik, yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Standar dan tujuan kebijakan GPM telah dipahami dengan baik oleh instansi pelaksana, khususnya Dinas Pertanian/Ketahanan Pangan dan Bulog. Tujuan utama, yakni menjaga stabilitas harga pangan, meningkatkan keterjangkauan, dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat, telah dijalankan sesuai pedoman Badan Pangan Nasional. Namun, pada tingkat masyarakat, pemahaman terhadap tujuan GPM belum

*Corresponding author

E-mail addresses: bagussubarkah14@gmail.com



sepenuhnya merata. Sebagian warga masih melihat GPM sebatas kegiatan pasar murah musiman, bukan sebagai program stabilisasi harga nasional. Meski demikian, manfaat program tetap dirasakan, meskipun beberapa komoditas memiliki selisih harga yang tidak terlalu signifikan.

Sumber daya pelaksanaan GPM dinilai cukup untuk menjalankan kegiatan, namun belum sepenuhnya memadai. Anggaran pemerintah daerah belum mampu memberikan subsidi langsung, sehingga harga murah sangat bergantung pada Bulog dan vendor. SDM yang bertugas cukup kompeten, tetapi jumlahnya terbatas dibandingkan jumlah pengunjung. Logistik seperti stok barang masih kurang stabil, terutama minyak goreng, gula, dan beras yang cepat habis. Keterbatasan kendaraan operasional juga menghambat mobilisasi barang. Kondisi ini membuat pemerataan manfaat belum optimal di seluruh lokasi.

Struktur dan pembagian peran antarinstansi sudah jelas, melibatkan Dinas Pertanian, Bulog, Prima Freshmart, perangkat desa, serta pihak keamanan. Koordinasi berjalan baik, terutama dalam persiapan dan penyediaan barang. Namun, tata teknis di lapangan seperti alur antrean, penataan stan, dan keteraturan pelayanan masih memerlukan perbaikan. Variasi kapasitas perangkat desa juga memengaruhi kelancaran pelaksanaan di tiap wilayah, di mana desa dengan perangkat aktif mampu menjalankan kegiatan lebih tertib.

Komunikasi pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten berjalan efektif melalui rapat, koordinasi, dan surat edaran. Namun komunikasi antara instansi pelaksana ke masyarakat masih belum optimal. Informasi mengenai jadwal seringkali berubah, sehingga warga kesulitan menyesuaikan waktu. Penyebaran informasi melalui WhatsApp memang cepat, tetapi tidak merata. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat mengetahui kegiatan secara mendadak dan tidak semua mendapat akses yang sama terhadap informasi program.

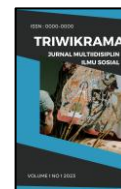
Sikap pelaksana dinilai sangat baik oleh masyarakat. Petugas dari Dinas Pertanian, Bulog, vendor, dan perangkat desa bekerja ramah, disiplin, responsif, serta mampu melayani masyarakat dengan baik meskipun jumlah pengunjung tinggi. Pelaksana juga menerima masukan warga dengan terbuka, seperti terkait pengaturan waktu pelaksanaan atau saran pembatasan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan GPM.

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Gresik yang cenderung sensitif terhadap kenaikan harga pangan membuat GPM sangat dibutuhkan dan diterima dengan baik. Antusiasme masyarakat tinggi, namun kondisi ekonomi seperti “tanggal tua” memengaruhi kemampuan sebagian warga untuk membeli. Dukungan pemerintah daerah melalui Peraturan Bupati Gresik Nomor 63 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi memperkuat keberlangsungan program karena memberikan dasar hukum yang jelas. Faktor sosial seperti kebiasaan warga saling membantu turut mendukung kelancaran pelaksanaan di lapangan. Secara politik, program ini tidak menimbulkan konflik dan diterima positif oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, implementasi Program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kabupaten Gresik telah berjalan cukup baik dan memberikan kontribusi nyata terhadap keterjangkauan dan ketersediaan pangan masyarakat. Meskipun demikian, efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui peningkatan sumber daya, penambahan stok, perbaikan penjadwalan, serta sosialisasi yang lebih luas dan terstruktur. Dengan berbagai perbaikan tersebut, GPM berpotensi menjadi program strategis yang berkelanjutan dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kabupaten Gresik, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang. Pemerintah daerah disarankan untuk menambah alokasi anggaran khusus guna mendukung keberlanjutan program, baik melalui subsidi harga maupun peningkatan jumlah komoditas, sehingga manfaat GPM dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu menyusun kebijakan teknis yang lebih operasional, seperti standar pembatasan pembelian dan pengaturan lokasi, serta melakukan evaluasi berkala



terhadap pelaksanaan GPM untuk menilai keberhasilan dan mengidentifikasi kendala yang terjadi di lapangan.

Selanjutnya, Dinas Pertanian/Ketahanan Pangan selaku instansi pelaksana perlu memperbaiki sistem komunikasi dan penjadwalan kegiatan agar informasi mengenai GPM dapat diterima masyarakat lebih awal dan tidak menimbulkan kebingungan. Penambahan SDM lapangan juga diperlukan agar pelayanan dapat mengimbangi tingginya jumlah pengunjung. Koordinasi dengan pemerintah desa harus terus diperkuat, terutama dalam hal sosialisasi dan pengaturan teknis pelaksanaan. Pada sisi lain, Bulog dan vendor seperti Prima Freshmart diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan stok komoditas yang paling diminati serta mensinkronkan waktu kedatangan barang dengan jadwal pelaksanaan GPM. Penataan stand yang lebih rapi dan terstruktur juga perlu diperbaiki agar proses pembelian berjalan lebih lancar.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan GPM, sehingga perlu meningkatkan penyebaran informasi melalui berbagai media, termasuk pengeras suara desa, spanduk, maupun pemberitahuan melalui RT/RW. Desa juga perlu membentuk tim pendukung teknis yang membantu menjaga ketertiban, mengatur antrean, serta mengawasi pembelian agar tidak terjadi pemborongan. Masyarakat sendiri diharapkan mengikuti kegiatan dengan tertib, tidak melakukan pembelian berlebihan, serta lebih aktif mencari informasi mengenai jadwal pelaksanaan GPM. Selain itu, masyarakat juga diharapkan memberikan masukan yang konstruktif untuk membantu peningkatan kualitas program di masa mendatang.

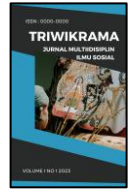
Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji efektivitas jangka panjang GPM terhadap ketahanan pangan rumah tangga atau melakukan penelitian pada wilayah yang lebih luas untuk mendapatkan perbandingan yang lebih komprehensif. Penelitian dengan metode campuran juga dapat menjadi pilihan agar data yang dihasilkan lebih lengkap dan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai implementasi Program Gerakan Pangan Murah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alfia, L. (2016). Implementasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Studi pada Dinas Pertanian Kabupaten Blitar). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(3), 49-58. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.03.7>
- Alhariri Abd Kadir, Fera Nayoam, & Wiri Wirastuti. (2023). Gerakan Pangan Murah (GPM) Terhadap Masyarakat Terdampak Bencana (Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah). *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi (Jrime)*, 1(2), 79-84. <https://doi.org/10.54066/jrime-itb.v1i2.175>
- Ariandi, H. P., Slamet, U., & Surakarta, R. (2025). EFEKTIVITAS PROGRAM GERAKAN PANGAN MURAH DI KOTA. 14(2).
- Atem, & Niko, N. (2020). Persoalan Kerawanan Pangan pada Masyarakat Miskin di Wilayah Perbatasan Entikong (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat. *Jurnal Surya Masyarakat*, 2(2), 94-104.
- Chaudhary, J., Thakur, K., Shelar, R., Singh, R., Rimpika, Devi, S., & Verma, S. (2024). Food Security in India: Milestones Achieved So Far. *Archives of Current Research International*, 24(5), 480-493. <https://doi.org/10.9734/acri/2024/v24i5725>
- Farisi, A. (2023). the Role of the Bondowoso District Government in Controlling Inflation. *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(4), 867-871.

*Corresponding author

E-mail addresses: bagussubarkah14@gmail.com



-
- Fazry, R. W. (2019). Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4), 358-375. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/download/3104/pdf>
- Fitri Nurzana, & Novrianti Novrianti. (2024). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Kenaikan Harga Pangan saat Mendekati Hari Raya Idul Fitri. *Jurnal Wilayah, Kota Dan Lingkungan Berkelanjutan*, 3(1), 178-185. <https://doi.org/10.58169/jwikal.v3i1.397>
- Indraswari, G. A., Anjani, R. R., & Jamal, A. (2024). Evaluasi Keputusan Pemerintah Melalui Pasar Murah dalam Menjaga Stabilisasi Harga Bahan Pokok di Surabaya. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(2), 14. <https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2420>